

**BAB III**  
**RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH**  
**DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

**3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH**

**3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2012**

Kondisi ekonomi makro Kabupaten Bogor tahun 2011 dengan berbagai indikator seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), inflasi, pendapatan per kapita, investasi, dan perkembangan keuangan daerah akan menjadi referensi dalam menentukan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya kebijakan ekonomi dalam RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013.

**A. Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Secara umum, pada tahun 2011 perekonomian Kabupaten Bogor mengalami pertumbuhan yang positif jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana sampai dengan akhir tahun 2011, PDRB Kabupaten Bogor atas dasar harga berlaku mencapai Rp.82,699 triliun, lebih tinggi dari nilai PDRB pada tahun 2010 sebesar Rp. 73,801 triliun atau meningkat 12,06 %, sedangkan PDRB berdasarkan harga konstan mencapai Rp. 34,379 triliun, lebih tinggi dari tahun 2010 sebesar Rp. 32,526 triliun atau naik 5,70 %. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa nilai PDRB, baik berdasarkan harga konstan maupun berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2010.

**Tabel 3.1. Nilai dan Kontribusi Sektor Usaha dalam PDRB 2008 - 2011**

NO	SEKTOR USAHA	TAHUN (Rp. Juta)							
		2008		2009		2010		2011	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.		Rp.	%
A.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	58.389.411,43		66.083.788,55		73.800.700,55		82.699.458,37	
	Primer	3.367.726,88	5,77	3.704.823,94	5,61	4.126.719,61	5,59	4.387.942,89	5,31
	Sekunder	40.078.637,69	68,64	44.952.879,24	68,02	49.614.605,55	67,23	55.043.884,21	66,56
	Tersier	14.943.046,86	25,59	17.426.085,36	26,37	20.059.375,40	27,18	23.267.631,26	28,14
B.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	29.721.698,04		30.952.137,83		32.526.449,67		34.378.837,29	
	Primer	1.816.061,80	6,11	1.887.540,00	6,10	1.987.614,49	6,11	1.996.900,33	5,81
	Sekunder	20.601.560,12	69,31	21.220.240,40	68,56	22.178.636,16	68,19	23.378.341,44	68,00
	Tersier	7.304.076,12	24,57	7.844.357,43	25,34	8.360.199,02	25,70	9.003.595,52	26,19

Sumber : BPS Kabupaten Bogor, 2011

Berdasarkan tabel di atas, sektor usaha yang memiliki proporsi terbesar pada struktur perekonomian Kabupaten Bogor adalah sektor usaha sekunder. Hal ini

menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Bogor didominasi oleh sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, serta sektor bangunan, yang mencapai 66,56 persen pada tahun 2011. Namun apabila memperhatikan perkembangan dari tahun 2008 – 2011, kontribusi sektor sekunder tersebut semakin menurun, yaitu 68,64% pada tahun 2008, 68,02% pada tahun 2009, 67,23% pada tahun 2010, dan 66,56% pada tahun 2011; sementara sektor tersier mulai bergerak naik dari 24,58% pada tahun 2008, 25,59% pada tahun 2009, 26,37% pada tahun 2010, dan 28,14% pada tahun 2011. Dengan demikian, lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta jasa-jasa lainnya, mulai banyak diminati di Kabupaten Bogor. Pertumbuhan sektor-sektor usaha tersebut sangat berhubungan dengan realisasi investasi yang masuk ke Kabupaten Bogor pada masing-masing kelompok lapangan usaha di tiap sektor. Pertumbuhan sektor sekunder dan tersier akan membuka peluang dalam menunjang sektor lain bergerak terutama sektor primer, khususnya kelompok lapangan usaha pertanian.

Sementara itu, apabila diperhatikan berdasarkan harga konstan angka laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 adalah sebesar 5,70%. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi makro, kondisi ekonomi Kabupaten Bogor relatif meningkat dan kondisi ini sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi tahun 2011 yang cukup rendah. Sebagaimana terlihat dari inflasi nasional sebesar 3,79 %, inflasi Jawa Barat sebesar 3,10 %, sedangkan tingkat inflasi di Bogor mencapai 2,85 %, jauh lebih rendah dibandingkan inflasi pada tahun 2010, yaitu sebesar 6,79 %

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bogor menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2011 jika dibandingkan dengan tahun 2010 menunjukkan pertumbuhan yang positif hampir di semua sektor kecuali sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan; sektor Pengangkutan dan Komunikasi; serta sektor Jasa-jasa. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor Bangunan yang mengalami pertumbuhan sebesar 8,98 persen. Selanjutnya diikuti oleh sektor Pengangkutan dan Komunikasi dengan pertumbuhan sebesar 8,84 persen, sedangkan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan pertumbuhan sebesar 8,17 persen berada di posisi ketiga. (sebagaimana tabel 3.2).

**Tabel 3.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bogor Tahun 2008 - 2011**

LAPANGAN USAHA	2008	2009	2010	2011*)
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	3.93	4.12	5.21	(0.87)
2. Pertambangan dan Penggalian	2.56	3.10	5.71	6.50
3. Industri Pengolahan	5.10	2.79	4.23	5.19
4. Listrik, Gas & Air Bersih	5.45	1.71	5.66	5.89
5. Bangunan	6.18	8.96	8.68	8.98
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	8.01	8.03	6.33	8.17
7. Pengangkutan & Komunikasi	6.12	8.69	9.21	8.84
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	7.07	6.22	6.52	7.04
9. Jasa-Jasa	5.14	4.52	5.72	5.19
<b>PDRB</b>	<b>5.58</b>	<b>4.14</b>	<b>5.09</b>	<b>5.70</b>

Sumber : BPS Kabupaten Bogor, 2011

Pada tahun 2012 diperkirakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi masih akan tetap meningkat. Meskipun demikian, masih memburuknya perekonomian negara-negara Eropa diperkirakan akan menjadi tekanan terhadap perekonomian tahun mendatang dari sektor industri domestik yang berbasis ekspor. Untuk mengimbangi penurunan ekspor, pemerintah harus meningkatkan konsumsi dan investasi. Konsumsi akan meningkat apabila tingkat inflasi dapat dikendalikan pada tingkat yang rendah. Sementara untuk mendorong investasi, pemerintah daerah harus meningkatkan pembangunan infrastruktur.

#### B. PDRB Per Kapita

Indikator yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan per kapita (*per capita income*). Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut dapat dikatakan bertambah baik. Tingkat pendapatan per kapita berdasarkan harga berlaku yaitu mencapai Rp.16.781.675,34,- /kapita/tahun, sementara berdasarkan harga konstan mencapai Rp.6.976.278.89 Jumlah ini jauh lebih tinggi dari tingkat pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Bogor baik pada tahun 2009 maupun tahun 2008. Bilamana pendapatan per kapita diatas, dihitung berdasarkan tingkat pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku pada setiap bulan, maka diperoleh pendapatannya sebesar Rp.1.398.473,- kapita/bulan. Demikian pula apabila dihitung pendapatan perkapita atas dasar harga konstan, maka hasilnya sebesar Rp.581.357,-/kapita/bulan.

**Tabel 3.3. PDRB Per Kapita Kabupaten Bogor Tahun 2008-2011**

NO	INDIKATOR	REALISASI KINERJA			
		2008	2009	2010	2011*
1	PDRB Per Kapita Berdasarkan Harga Berlaku	12.959.070,42	14.232.423,29	15.465.580,93	16.781.675,34
2	PDRB Per Kapita Berdasarkan Harga Konstan	6.596.497,01	6.666.142,13	6.816.201,42	6.976.278,89

Sumber : BPS Kabupaten Bogor, 2011

### C. Investasi

Nilai realisasi investasi swasta melalui PMA dan PMDN selama periode tahun 2010-2011 terus mengalami peningkatan, terutama apabila diperhatikan berdasarkan nilai relatif masing-masing proyek. Dengan jumlah 18 proyek PMA, nilai investasi mencapai Rp.2.029,919 milyar rupiah, sementara pada tahun 2010, dengan jumlah 57 proyek, nilai investasi mencapai Rp. 2.029,919 milyar rupiah. Begitu pula dengan investasi PMDN, 15 proyek yang direalisasikan di tahun 2011 mencapai nilai investasi sebesar RP. 1.244,513 milyar rupiah, sementara pada tahun 2010, 20 proyek yang direalisasikan, hanya mencapai 503.249 milyar rupiah. Dengan demikian, realisasi nilai proyek investasi sepanjang tahun ini relatif meningkat secara signifikan, meskipun jumlah proyek investasinya menunjukkan penurunan.

Diharapkan pada tahun 2012 kinerja investasi di Jawa Barat ini dapat membaik seiring dengan peningkatan peringkat Indonesia menjadi negara layak investasi.

### 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014

Berdasarkan latar belakang kondisi ekonomi Kabupaten Bogor pada tahun-tahun sebelumnya, tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Bogor, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran global, nasional, maupun lingkungan regional Jawa Barat dan Kabupaten Bogor sendiri.

#### A. Global

Setelah resesi global sejak pertengahan tahun 2008 yang dimulai dengan krisis *mortgage fund* di Amerika Serikat, upaya pemulihan ekonomi dunia yang dimulai sejak akhir 2009, rupanya masih disusul oleh krisis ekonomi lainnya yang berasal dari belahan dunia lain yaitu negara-negara eropa seperti Portugal, Italia, Yunani (Greece) dan Spanyol (PIGS) sampai dengan tahun 2011. Belum lagi kesulitan ekonomi Jepang akibat bencana tsunami tahun 2009 pun masih belum dapat sepenuhnya dapat diatasi hingga akhir tahun 2011. Secara sekilas walaupun memang Amerika Serikat mulai membaik perekonomiannya sejak tahun 2011, namun perbaikan ini terasa sangat lambat dibandingkan prediksi semula, terlebih rata-rata pertumbuhan ekonomi negara-negara Uni Eropa hanya mencapai 1,2%

sepanjang periode 2008-2011. Tidaklah mengherankan bila kemungkinan masih terus melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia ini juga ditunjukkan dengan proyeksi Bank Dunia yang hanya akan tumbuh sebesar 2,6% pada tahun 2012 dan 3,2% pada tahun 2013, *International Monetary Fund (IMF)* juga telah merevisi angka proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia nya dari 3,8% (2012) dan 4,5% (2013) menjadi hanya 3,3% (2012) dan 3,9% (2013).

Secara umum pemulihan ekonomi global saat ini disebabkan oleh relatif berhasilnya intervensi pemerintah di berbagai negara yang telah mendorong sisi permintaan dan mengurangi ketidakpastian dan terjadinya resiko sistemik pada pasar keuangan. Namun berbagai peringatan telah dikemukakan oleh para ekonom dunia, IMF dan Bank Dunia, bahwa pemulihan tersebut memiliki beberapa tantangan yang harus dihadapi dan diantisipasi dalam lima tahun ke depan, yaitu: (1) utang negara maju yang meningkat sejalan dengan upaya peningkatan stimulus fiskal; (2) tingkat pengangguran yang tinggi di negara-negara maju; (3) ketidakpastian harga minyak di pasar dunia yang sangat sensitif terhadap konflik politik antar negara.

Harga minyak mentah dunia diawal tahun 2012 sempat menembus level US\$ 100 per barrel. Memang setelah sinyal psikologis positif dikeluarkan beberapa lembaga keuangan internasional seperti IMF harga tersebut perlahan turun ke angka US\$ 86. Namun kenaikan ekstrim harga minyak mentah dunia akan sangat mungkin terjadi kembali mengingat negara-negara yang diperkirakan akan mulai pulih kondisi perekonomiannya seperti Amerika Serikat dan Jepang akan meningkatkan permintaan minyak mentah dunia. Berdasarkan prediksi OPEC, jika terjadi peningkatan permintaan konsumsi diatas 6 juta barrel, maka kenaikan harga minyak secara sporadis tidak dapat dielakkan. Sebagai efek domino adalah kenaikan harga komoditas yang tentu akan meningkatkan laju inflasi.

Secara gradual selama dua tahun terakhir, nyata terjadi pergeseran kekuatan ekonomi global dari Barat ke Timur. Perekonomian Amerika Serikat dan negara industri maju di Eropa memang masih tetap menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar komoditi bagi ekspor negara-negara berkembang, namun perekonomian negara-negara Asia terbukti lebih tangguh secara fundamental baik secara makro dan mikro ekonomi pasca krisis global 2008, dan telah menjadi motor penggerak perekonomian dunia. China, India dan negara-negara industri di Asia lainnya mulai terlihat dominasinya dalam perekonomian dunia dan menjadi kawasan yang menarik bagi penanaman modal terutama *hot money* yang berasal dari negara-negara Eropa yang sedang dilanda masalah keuangan.

Pemulihan ekonomi di Asia yang makin membaik pada akhir tahun 2011 serta fakta masih melambatnya pemulihan ekonomi dunia bahkan sampai dengan tahun

2012 harus dapat diantisipasi oleh ketahanan ekonomi nasional yang stabil dan lentur terhadap dampak ekonomi global, terlebih eksposur perekonomian Indonesia yang sangat nyata khususnya pada peta perdagangan komoditas. Dalam menghadapi trend pelambatan pemulihan ekonomi dunia pasca krisis keuangan, ekspektasi yang baik terhadap kelanjutan pemerintahan serta perkiraan lingkungan eksternal pada tahun 2013 – 2014 mutlak diperlukan.

Meskipun diwarnai optimisme, dinamika perekonomian ke depan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang berpotensi menghambat akselerasi perbaikan ekonomi. Dari sisi eksternal, tantangan terutama berkaitan dengan dampak dari strategi mengakhiri langkah kebijakan yang ditempuh pada masa krisis (*exit strategy*), yang antara lain berupa pelonggaran likuiditas dan ekspansi fiskal di negara maju. Tantangan eksternal juga berhubungan dengan terjadinya kecenderungan polarisasi perdagangan dunia, serta masih tingginya ketidakseimbangan dalam kinerja perekonomian global. Dari sisi domestik, tantangan berkaitan dengan beberapa permasalahan yang masih dapat mengganggu efektivitas kebijakan moneter, seperti ekses likuiditas perbankan yang masih cukup besar, masih besarnya peranan investasi portofolio dalam struktur aliran modal masuk, potensi penggelembungan harga aset di pasar keuangan, pasar keuangan yang dangkal, dan berbagai permasalahan struktural di sektor riil.

Tren global memperoyeksikan tumbuhnya permintaan yang pesat akan makanan, energi, produk kesehatan dan barang-barang konsumsi.

**Tabel 3.4. Tren Global Dalam Permintaan Makanan, Energi, Produk Kesehatan dan Barang Konsumsi**

No	Tren Global	Dampak
1	Pertumbuhan populasi dunia dari 7 Miliar ke 9 miliar tahun 2050	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kekurangan persediaan air bersih</li> <li>• Kenaikan permintaan makanan sekitar 70%</li> </ul>
2	Pertumbuhan populasi lanjut usia	Tumbuhnya kebutuhan produk dan pelayanan kesehatan
3	Menipisnya cadangan minyak bumi sebagai sumber energi utama	Harga minyak akan naik, mencapai harga yang tidak ekonomis
4	Pergeseran kekuatan ekonomi ke Asia. Pada tahun 2050, Asia akan berkontribusi 50% dari PDB dunia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kenaikan pesat permintaan barang dan jasa di Asia, baik sisi kuantitas maupun kualitas</li> <li>• Pada tahun 2050, India &amp; China akan memiliki 100 juta rumah tangga berpendapatan tinggi.</li> </ul>

No	Tren Global	Dampak
5	Krisis di Kawasan Eropa dan Amerika Serikat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eropa dan AS merupakan pasar potensial untuk ekspor Jawa Barat, 13% nilai ekspor Jawa Barat ke Eropa. Krisis Di Eropa dan AS diduga akan mengurangi konsumsi masyarakat di wilayah tersebut sehingga diduga akan mengurangi nilai impor dari Indonesia termasuk Jabar.</li> </ul>

Sumber : Komite Ekonomi Nasional (point 1-4)

## B. Nasional

Beberapa hasil-hasil positif yang telah dicapai pada pembangunan nasional tahun sebelumnya antara lain pulihnya stabilitas system keuangan, menguatnya nilai tukar rupiah, rendahnya tingkat inflasi, dan cukup tingginya pertumbuhan ekonomi. Optimisme terhadap perbaikan prospek perekonomian semakin diperkuat dengan prospek ekonomi global yang diperkirakan semakin kondusif. Bahkan IMF memproyeksikan bahwa Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi kedua tercepat diantara 18 ekonomi terbesar dunia pada tahun 2009-2015.

Berdasarkan data *World Outlook* (IMF, 2011) bahwa Sejak tahun 2010-2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat. Ada beberapa hal yang menjadi prospek bagi pembangunan perekonomian Indonesia (Komite Ekonomi Nasional ):

- 1) Rasio hutang terhadap PDB cenderung terus menurun;
- 2) Cadangan devisa Indonesia cenderung terus meningkat;
- 3) Investasi asing di Indonesia terus meningkat, dan kinerja perbankan terus membaik. Hal ini memberikan kepercayaan bagi negara lain untuk berinvestasi di Indonesia, termasuk Jawa Barat;
- 4) Dalam masterplan Ekonomi, Indonesia diproyeksikan menjadi Negara "High Income" pada tahun 2025 dengan nilai GDP nominal perkapita sebesar US\$ 14.900;
- 5) IMF memproyeksikan Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi kedua tercepat di antara 18 ekonomi terbesar dunia pada tahun 2009-2015;
- 6) Indonesia akan menjadi semakin dominan di ASEAN dan mulai menjadi lebih besar dari beberapa Negara Eropa;
- 7) Pada tahun 2020 indonesia diproyeksikan akan mempunyai populasi pertumbuhan penduduk produktif yang baik yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang pesat dan stabil.

Selain prospek secara makro, terdapat pula prospek pada beberapa sektor kunci antara lain:

- 1) Pemulihan ekonomi global akan mendorong terhadap tumbuhnya permintaan atas bahan baku dan energi yang akan menyebabkan kenaikan harga minyak

dan sumber energi alternatif seperti batu bara, CPO. Kondisi ini akan memacu pertumbuhan sektor pertambangan dan produksi komoditas;

- 2) Tumbuhnya daya beli masyarakat, yang diindikasikan oleh PDB perkapita Indonesia tahun 2010 mencapai US\$ 3.005, dengan nilai tersebut bahwa Indonesia berada pada ambang batas dimana akan terjadi pertumbuhan konsumsi *discretionary* dan barang mewah yang pesat. Kondisi ini akan meningkatkan konsumsi makanan dan minuman, ritel, telekomunikasi, otomotif, pariwisata serta sektor pendukung lainnya seperti konstruksi dan pengolahan. Pada tahun 2013 -2015, permintaan terhadap makanan akan semakin dengan pertumbuhan 9%. Sedangkan permintaan terhadap minuman 11%-15% per tahun sampai 2015. Permintaan terhadap obat-obatan akan terus meningkat dengan pertumbuhan 11% sampai tahun 2014. Industri telekomunikasi tumbuh 11% sampai tahun 2015, pengguna internet akan terus meningkat dengan pertumbuhan 33% sampai tahun 2015. Industri mobil dan motor juga diperkirakan akan terus meningkat, tahun 2011-2015 diproyeksikan pertumbuhannya masing-masing mencapai 14%, dan 11,9%. Kunjungan wisata ke Indonesia akan terus meningkat. Sektor pertambangan dari tahun 2011-2015 akan terus meningkat dengan pertumbuhan 13%. Begitu pula dengan produksi CPO diperkirakan akan terus meningkat.

Bank Indonesia memperkirakan kondisi perekonomian nasional akan terus membaik pada tahun 2012, berdasarkan asumsi membaiknya kinerja ekspor akibat: (i) membaiknya perekonomian negara-negara Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang, (ii) peningkatan konsumsi masyarakat sebagai efek perbaikan kinerja ekspor dan peningkatan penyerapan tenaga kerja, (iii) meningkatnya investasi sebagai akibat meningkatnya aliran *Foreign Direct Investment* (FDI) terlebih karena masih lambatnya upaya pemulihan di negara-negara Uni Eropa, (iv) dukungan pengeluaran pemerintah, (v) nilai tukar cenderung stabil, serta (vi) tekanan inflasi yang semakin menurun. Potensi tekanan inflasi tahun 2013 dan 2014 diperkirakan tidak akan terlalu parah seperti yang dikhawatirkan para pengamat. Memang benar bahwa besarnya inflasi pada tahun 2012 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 (dari 3,78% menjadi rentang 4.5% + 1%), terlebih dengan wacana pembatasan BBM bersubsidi dan kenaikan Tarif Dasar Listrik pada pertengahan tahun 2012, demikian juga dengan tekanan dari sisi harga minyak mentah dunia diperkirakan akan tetap menjadi ancaman, lebih dikhawatirkan lagi adalah perubahan iklim (*climate change*), namun pada tahun 2013 dan 2014, seiring dengan perkiraan membaiknya perekonomian dunia dan adaptasi masyarakat terhadap keseimbangan ekonomi baru maka nilai inflasi akan kembali menuju

tingkat keseimbangan baru yaitu pada rentang 3,5% - 6%. Seperti halnya perekonomian nasional di tahun 2011 dan 2012, permintaan domestik dan kinerja ekspor diperkirakan akan tetap menjadi kekuatan utama pertumbuhan ekonomi seiring bangkitnya perekonomian global pada tahun 2013 dan 2014. Bila momentum FDI dapat dimanfaatkan secara optimal, diyakini bahwa penguatan sisi permintaan domestik ini akan mampu diimbangi dengan meningkatnya daya dukung kapasitas perekonomian, sehingga mampu menjaga kecukupan di sisi produksi.

Secara umum beberapa kondisi yang perlu diwaspadai oleh Indonesia pada tahun 2013 dan 2014 adalah harga minyak dunia (yang sudah menembus level US\$ 100 per barrel-nya), tingkat volatilitas rupiah terhadap dollar yang masih cukup tinggi, masih didominasinya arus modal masuk yang bersifat jangka pendek, masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial, belum lagi masalah politik dan hukum yang dapat mengganggu tingkat kepercayaan masyarakat baik domestik maupun internasional.

Komite Ekonomi Nasional mengemukakan ada beberapa tantangan bagi ekonomi Indonesia yang perlu diatasi demi memperkuat daya saing di kancah Global seperti disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.5. Tantangan Ekonomi Indonesia dalam Kancah Global**

No	Bidang	Uraian
1	Infrastruktur	Mempercepat pembangunan konektivitas nasional untuk mewujudkan Negara kesatuan secara ekonomi
2	Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurut <i>World Economic Forum Global Competitiveness Report</i>, Indonesia berada di ranking 89 (dari 139) dan tertinggal dari Negara-negara di Asia untuk pendaftaran paten.</li> <li>• Rangkaian 77 untuk pemanfaatan teknologi baru, di belakang Malaysia, Thailand, Filipina.</li> </ul>
3	Modal Manusia	Indonesia meluluskan 800 ribu lulusan sarjana setiap tahun. Ke-7 terbesar di dunia setelah (China, India, USA, Russia, Japan, Brazil). Namun saat ini hanya 1 dari setiap 4 anak Indonesia yang berkesempatan masuk ke Perguruan Tinggi.
4	Birokrasi	Reformasi birokrasi di semua lini : pemerintahan pusat dan daerah
5	Mindset	Mendorong budaya kerja keras, inovati, kreatif dan berjiwa wirausaha.

Sumber : Komite Ekonomi Nasional

Indonesia mempunyai beberapa kelebihan pada sumber daya alam dan manusia yang berpeluang besar untuk menjawab tantangan tersebut.

**Tabel 3.6. Peluang Ekonomi Indonesia**

No	Bidang	Peluang	Tindakan yang perlu dilakukan
1	Pertanian	Indonesia salah satu penyedia hasil pertanian dan hayati terbesar di dunia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan produktivitas pertanian, baik dalam proses pembenihan, penanaman, dan panen</li> <li>• Industrialisasi proses pasca panen untuk menghasilkan produk bernilai tambah</li> <li>• Penerapan bioteknologi untuk menghasilkan bibit unggul maupun obat-obatan</li> </ul>
2	Energi	Indonesia penyedia energi alternatif dan sumberdaya alam bernilai tambah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan teknologi mutakhir dalam proses eksplorasi dan ekstraksi sumberdaya alam, serta pada industri pengolahan hilir untuk menghasilkan produk bernilai tambah</li> <li>• Mengembangkan sumber energi alternatif: geotermal, biofuel, matahari, angin, hidrogen</li> </ul>
3	Industri	Indonesia merupakan salah satu pusat industri manufaktur terbesar dunia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan untuk menghasilkan tenaga kerja berdaya saing global.</li> <li>• Memfasilitasi penerapan teknologi manufaktur terkini di berbagai sektor untuk meningkatkan kapasitas, kualitas dan efisiensi</li> </ul>

Sumber : Komite Ekonomi Nasional

Mengimbangi kondisi perekonomian global yang rupanya tidaklah sebgus yang diharapkan selama periode pemulihan ekonomia dunia pasca krisis Global 2008, maka Indonesia melalui revisi publiksi Bank Indonesia "Outlook Ekonomi Indonesia 2009-2014" telah memprediksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2012 hanya akan sebesar 6.3% dibandingkan proyeksi sebelumnya yaitu 6,5%. Pada tahun 2013 proyeksi pertumbuhan nasional tetap diproyeksikan sebesar 6,4-6,8%, sedangkan di tahun 2014 proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional adalah 6,5%-6,9%. Asumsi pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti oleh asumsi pertumbuhan konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah, investasi, ekspor dan impor barang dan jasa. Angka perkiraan pertumbuhan ekonomi nasional tersebut tentunya telah memperhitungkan dampak diberlakukannya beberapa pakta perdagangan regional seperti *Asean China Free Trade Area (ACFTA)*, *Asean India Free Trade Area (AIFTA)*, dan juga *Asean Australia New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)*.

Konsumsi masyarakat terus didorong dengan meningkatkan daya beli masyarakat melalui upaya mengendalikan inflasi dan menjaga ketersediaan bahan pokok. Upaya untuk mendorong investasi dilakukan dengan peningkatan harmonisasi kebijakan dan penyederhanaan prosedur perijinan investasi; dan peningkatan fasilitas investasi. Ekspor terus dipacu pertumbuhannya dengan berbagai kebijakan, antara lain peningkatan akses pasar internasional terutama

pasar non tradisional; peningkatan dan diversifikasi produk ekspor dan peningkatan fasilitas ekspor. Hal ini terutama untuk mengatasi kemungkinan permasalahan yang timbul akibat pemberlakuan ACFTA, AIFTA, dan AANZFTA.

**Tabel 3.6. Kondisi Indikator Ekonomi Nasional Tahun 2010-2013**

INDIKATOR	2010	2011				2011*	2012*	2013*
		I	II	III*	IV*			
Konsumsi Rumah Tangga	4,6	4,5	4,6	4,8	4,9	4,7	4,7-5,1	4,7-5,1
Konsumsi Pemerintah	0,3	2,8	4,5	2,5	6,9	4,5	7,4-7,8	4,7-5,1
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	8,5	7,3	9,4	7,1	7,2	7,7	9,7-10,1	11,8-12,2
Ekspor Barang dan Jasa	14,9	12,5	17,5	18,5	17,3	16,5	11,7-12,1	12,8-13,2
Impor Barang dan Jasa	17,3	14,4	15,3	14,2	14,1	14,5	13,5-13,9	15,3-15,7
PDB	6,1	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,3-6,7	6,4-6,8

Keterangan : \* : Proyeksi Bank Indonesia

Sementara di sisi produksi, upaya mendorong pertumbuhan industri pengolahan non migas akan didorong kembali sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, melalui kebijakan peningkatan populasi usaha industri, penguatan struktur industri dan peningkatan produktivitas usaha industri. Sementara sektor lain seperti pertanian, perikanan dan kehutanan di upayakan dengan kebijakan mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian serta peningkatan pendapatan petani.

Sementara untuk efisiensi keuangan negara sebagai prioritas, Menteri Keuangan telah menetapkan dalam RAPBN 2012 untuk menurunkan besaran subsidi, terutama membatasi subsidi BBM dan mengubahnya menjadi subsidi yang lebih tepat sasaran seperti subsidi pupuk. Dilakukan pula upaya-upaya untuk menstabilkan harga-harga yang tetap menjadi prioritas utama pemerintah, mengingat tekanan harga komoditas di pasar internasional dan tekanan terhadap masyarakat yang cukup tinggi. Prioritas lain adalah pembenahan infrastruktur publik melalui paket kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di seluruh koridor pulau di Indonesia – patut dicatat bahwa dari total 98 proyek infrastruktur MP3EI di Koridor Jawa, berdasarkan skema pembiayaan: pemerintah, BUMN, dan campuran (termasuk swasta), terdapat 32 proyek yang berlokasi di Jawa Barat. Selain itu, telah dicanangkan pula revitalisasi pabrik gula yang merupakan program prioritas departemen industri. Kebijakan-kebijakan tersebut diprioritaskan untuk menjawab tantangan dinamika dalam perekonomian Indonesia

### **C. Jawa Barat**

Dengan memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian daerah, nasional maupun global beberapa tahun sebelumnya serta proyeksi perkembangan ekonomi

daerah, nasional, dan internasional, secara makro pada tahun 2012-2014 prospek pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat diprediksikan masih dalam kondisi yang cukup stabil meskipun dihadapkan pada tantangan kondisi pemulihan perekonomian global yang penuh ketidakpastian. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, proyeksi indikator makro ekonomi Provinsi Jawa Barat diproyeksikan sebagai berikut :

**Tabel 3.7. Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2014**

Indikator	Proyeksi		
	2012	2013	2014
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			
■ Pesimistis	6.54	6.88	7.21
■ Moderat	6.60	6.95	7.25
■ Optimistis	6.77	7.03	7.29
Kemiskinan	9.55	8.73	7.91
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8.85	7.95	7.05

Sumber: hasil estimasi

Perekonomian nasional diperkirakan akan sedikit mengalami penurunan pertumbuhan dibanding tahun 2011, yaitu mencapai kisaran 6,2 hingga 6,4%. Sementara itu, dampak krisis Eropa dan Amerika akan mulai terasa pada semester I/2012 dan diprediksikan belum akan terjadi perbaikan yang cukup signifikan selama tahun 2012. Hal ini akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Barat, sehingga pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2012 akan cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2011.

Seperti halnya perekonomian nasional, Perekonomian Provinsi Jawa Barat jelas akan terpengaruh faktor krisis Amerika dan Eropa, sehingga Jawa barat harus mengantisipasi dan menyiapkan diri terhadap berbagai kemungkinan negatif dari krisis tersebut. Perlambatan laju pertumbuhan ekspor diprediksikan akan terjadi pada perekonomian nasional dan cukup berimbas pada perekonomian Jawa Barat, mengingat hingga saat ini, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang paling dominan dalam melakukan kegiatan ekspor. Kawasan Eropa dan Amerika merupakan pasar utama ekspor produk-produk Jawa Barat, menurunnya daya beli masyarakat Eropa dan Amerika secara otomatis menurunkan permintaan ekspor mereka, sehingga dapat menyebabkan perlambatan laju pertumbuhan ekspor produk-produk Jawa Barat.

Dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian global diatas, maka skenario laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat diprediksikan hanya akan tumbuh sebesar 6.54% pada tahun 2012 (skenario pesimistis), 6.88% untuk tahun 2013 dan 7.21% pada tahun 2014. Namun apabila kondisi perekonomian global menunjukkan

kondisi yang sedikit lebih baik dibandingkan kondisi diatas, maka skenario pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang moderat secara berturut-turut akan tumbuh sebesar 6.60% pada tahun 2012, 6.95% pada tahun 2013, dan 7.05% di tahun 2014. Sementara itu, apabila kondisi pemulihan ekonomi global tidak seperti yang diprediksikan oleh banyak kalangan, dalam arti kondisi perekonomian global menunjukkan tanda-tanda positif dan akselerasi pemulihan dapat dipercepat, dan atau perekonomian nasional dan daerah relatif lebih stabil dan cukup tahan terhadap dampak krisis global, maka skenario laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dapat diproyeksikan kedalam skenario yang optimis, sehingga laju pertumbuhan ekonomi diprediksikan akan tumbuh sebesar 6.77% pada tahun 2012, 7.03% pada tahun 2013, dan 7.29% pada tahun 2014.

Untuk mewujudkan laju pertumbuhan ekonomi propinsi yang optimis, maka:

- Kinerja sektor-sektor unggulan yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Jawa Barat harus dapat dipertahankan didorong untuk lebih produktif.
- Pertumbuhan investasi dan perdagangan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren pertumbuhan naik, disamping tren penurunan laju inflasi dan suku bunga yang dapat memicu laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat harus bisa dipertahankan.
- Terkait dengan investasi, kawasan Jawa Barat harus mampu memanfaatkan momentum beralihnya fokus investor ke negara-negara Asia dan dapat menyerap aliran modal menyusul krisis yang melanda kawasan Eropa dan Amerika. Beberapa kawasan dengan daya dukung infrastruktur yang memadai masih akan menjadi tujuan utama arus modal. Serapan investasi ke propinsi Jawa Barat berpeluang lebih besar jika daya dukung infrastruktur diperkuat.

Prediksi pertumbuhan ekonomi makro propinsi Jawa Barat yang mencapai lebih dari 6% bukan merupakan suatu hal yang mustahil apabila potensi-potensi daerah yang dimiliki oleh propinsi Jawa Barat dapat dioptimalkan dan disertai dengan tata kelola ekonomi yang baik, yang memungkinkan dalam percepatan pembangunan dan sekaligus dalam upaya pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Pencapaian ke arah prediksi ekonomi makro yang optimis, tentunya menjadi tantangan ke depan yang harus disikapi oleh pemerintah daerah dengan cara melakukan terobosan-terobosan/inovasi-inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah, misalnya dengan cara pendekatan pembangunan industri wilayah untuk mencapai daya saing daerah melalui pencapaian skala ekonomis.

Berdasarkan hasil simulasi Produk Domestik Regional Bruto Jawa Barat tahun 2012-2014 dari sisi sektoral, Jawa Barat masih ditandai dengan tingginya laju pertumbuhan sektor Konstruksi dan dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR). Kedua sektor tersebut untuk periode tahu 2012-2014, masing-masing tumbuh pada kisaran 13.4%-14.9% dan 11.4%-12.9%

**Tabel 3.8. Proyeksi Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Barat Tahun 2012-2014 Menurut Lapangan Usaha (ADH Konstan 2000)\***

Sektor	2012		2013		2014	
	Nilai (Milyar Rp)	Pertumbuhan	Nilai (Milyar Rp)	Pertumbuhan	Nilai (Milyar Rp)	Pertumbuhan
1. Pertanian	47,217.01	6.09	50,307.76	6.55	53,832.14	7.01
2. Pertambangan & penggalian	8,133.91	4.90	8,616.91	5.94	9,217.66	6.97
3. Industri pengolahan	147,799.68	4.49	154,313.48	4.41	160,979.98	4.32
4. Listrik, gas, dan air minum	8,427.33	7.46	9,078.97	7.73	9,805.54	8.00
5. Konstruksi	15,092.23	13.42	17,230.51	14.17	19,800.69	14.92
6. Perdagangan, hotel & restoran	86,347.60	11.40	96,878.08	12.20	109,465.34	12.99
7. Pengangkutan & komunikasi	18,312.99	9.35	20,076.21	9.63	22,064.40	9.90
8. Keuangan, real estate & jasa perusahaan	11,937.91	6.23	12,666.40	6.10	13,422.60	5.97
9. Jasa-jasa	23,900.04	4.31	24,852.50	3.99	25,763.11	3.66
<b>PDRB</b>	<b>366,063.72</b>	<b>6.77</b>	<b>391,801.00</b>	<b>7.03</b>	<b>420,359.43</b>	<b>7.29</b>

Sumber: Hasil estimasi

Keterangan: \* Skenario optimis

Sementara dilihat dari kontribusinya, perekonomian Jawa Barat masih ditopang oleh sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR). Pada periode tahun 2012-2014, Sektor Industri Pengolahan diprediksikan akan memiliki kontribusi sekitar 40.38% pada tahun 2012, 39.39% pada 2013, dan 38.30% pada tahun 2014. Sedangkan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran diprediksikan akan menyumbang sekitar 23.59% pada tahun 2012, 24.73% untuk tahun 2013, dan 26.04% pada tahun 2014 dalam pembentukan PDRB secara keseluruhan.

**Tabel 3.9. Proyeksi Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Barat Tahun 2012-2014 Menurut Lapangan Usaha (ADH Konstan 2000)\***

Sektor	2012	2013	2014
1. Pertanian	12.90	12.84	12.81
2. Pertambangan & penggalian	2.22	2.20	2.19
3. Industri pengolahan	40.38	39.39	38.30
4. Listrik, gas, dan air minum	2.30	2.32	2.33
5. Konstruksi	4.12	4.40	4.71
6. Perdagangan, hotel & restoran	23.59	24.73	26.04
7. Pengangkutan & komunikasi	5.00	5.12	5.25
8. Keuangan, real estate & jasa perusahaan	3.26	3.23	3.19
9. Jasa-jasa	6.53	6.34	6.13
<b>PDRB</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Sumber: Hasil Estimasi

Dari sisi tingkat kemiskinan, diprediksikan angka kemiskinan secara gradual akan menurun. Pada tahun 2012 tingkat kemiskinan di propinsi Jawa Barat akan berada pada kisaran 9.55% dari total penduduk Jawa Barat. Pada tahun 2013, tingkat kemiskinan di Jawa Barat diperkirakan akan berada pada kisaran 8.73%, dan tahun 2014 sekitar 7.91. Sejalan dengan tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga akan memiliki kecenderungan tren yang menurun. Pada tahun 2012, Tingkat Pengangguran Terbuka akan berada pada kisaran angka 8.85%, sementara tahun 2013 berada pada kisaran 7.95%, dan tahun 2014 sekitar 7.05%.

Untuk menjamin agar proyeksi tersebut dapat terealisasi, tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah Jawa Barat adalah menjamin terciptanya kesempatan kerja yang signifikan, terutama untuk sektor-sektor yang bersifat padat karya, mendorong program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat (terutama di perdesaan) yang efektif, memperbaiki program-program pengentasan kemiskinan diantaranya memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar (seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi dan sebagainya) serta upaya penciptaan program pembangunan yang inklusif, yang diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat.

Tantangan lain dari perekonomian Jawa Barat untuk tiga tahun ke depan selain kondisi pemulihan ekonomi global yang penuh ketidakpastian adalah permasalahan yang terkait dengan isu perubahan iklim (*climate change*). Isu ini akan sangat terkait erat dengan permasalahan resiko menurunnya ketahanan pangan, apalagi propinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Tren kecenderungan harga komoditas pangan dunia sejak tahun 2000-an

menunjukkan tren yang semakin meningkat, ini menjadi pertanda bahwa dampak perubahan iklim sudah mulai terasa, dimana dampaknya tidak hanya bagi perekonomian nasional, tetapi juga terhadap perekonomian Jawa Barat. Hal ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi skenario pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, dimana resiko menurunnya ketahanan pangan ini akan mempengaruhi kondisi masyarakat dari sisi daya beli. Penurunan daya beli dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, karena selama ini salah satu penopang laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang utama dari sisi permintaan adalah konsumsi masyarakat.

Investasi menjadi penting artinya dalam menjamin pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang tinggi. Dibutuhkan investasi yang besar untuk meningkatkan dan mempertahankan posisi Jawa Barat sebagai salah satu propinsi utama di Indonesia dan perannya sebagai daerah penyangga ibukota DKI Jakarta. Untuk menjamin kontribusi ekonomi Jawa Barat di level 14% PDB nasional dibutuhkan investasi Rp. 397 trilyun di tahun 2012 dan meningkat menjadi Rp. 544 trilyun di tahun 2014 (Komite Ekonomi Nasional, 2011). Sumber pemerintah untuk membiayai pembangunan ekonomi sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan investasinya (hanya sekitar 6%), sehingga dibutuhkan peran BUMD, Swasta, dan asing untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

**Tabel 3.10. Proyeksi Kebutuhan Investasi Provinsi Jawa Barat**

(Rp. Trilyun)	2010	2011	2012	2013	2014
Kebutuhan investasi Nasional	2.037	2.544	3.014	3.379	3.889
Kebutuhan investasi Jawa Barat	285	356	422	473	544
- Sumber Pemerintah	17	21	25	28	33
Sumber BUMD, Swasta, dan Asing	268	335	397	445	511

Sumber: Komite Ekonomi Nasional, 2011

Krisis ekonomi dunia yang saat ini terjadi memang merupakan salah satu tantangan yang cukup berat bagi kinerja perekonomian Jawa Barat, namun salah satu aspek yang dapat dijadikan peluang adalah momentum pengalihan investasi di kawasan-kawasan yang sedang mengalami krisis ke Asia sebagai target utama dapat dimanfaatkan oleh propinsi Jawa Barat untuk dapat menyerap arus modal masuk, dengan berbagai strategi seperti:

- 1) Memfasilitasi terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif:
  - Identifikasi faktor-faktor yang membuat iklim usaha dan investasi belum kondusif (Perda bermasalah, perijinan, berbagai pungutan, masalah kepastian hukum dsb),
  - Melakukan tindakan nyata untuk mengurangi faktor-faktor penghambat tsb,

- Meningkatkan efektivitas dan sinergi promosi dan penyebaran informasi peluang investasi.
- 2) Mengatasi keterbatasan berbagai sarana dan prasarana transportasi
    - Darat: O&M jalan-jalan propinsi, keterbatasan daya dukung vs pengendalian angkutan berat, serta realisasi pembangunan jalan tol yang sudah direncanakan
    - Laut: Pelabuhan laut regional Cirebon (dan akses jalan ke pelabuhan tersebut)
    - Udara: Optimalisasi Pelabuhan Udara Husein Sastranegara, percepatan realisasi pembangunan 2 bandar udara yang baru.
  - 3) Mengatasi keterbatasan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung produktivitas sektor pertanian:
    - Masalah pembiayaan O&M, misalnya untuk jaringan irigasi dan saluran air (peran Kabupaten dan masyarakat pengguna; penerapan *irrigation service fee*)
    - Identifikasi dan persiapan *feasibility study* untuk proyek-proyek yang bersifat strategis
  - 4) Mengatasi keterbatasan berbagai sarana dan prasarana utilitas publik
    - Koordinasi dengan pusat, khususnya untuk penyediaan suplai listrik
    - Masalah pemanfaatan dengan ketersediaan air bawah tanah dan sumber air permukaan

Dengan masuknya investasi yang memadai, selanjutnya akan dapat menciptakan kesempatan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, dan upaya pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan menjadi lebih mudah.

Selain tantangan tersebut di atas ada beberapa tantangan lain yang terkait dengan perekonomian Jawa Barat ke depan antara lain:

- 1) Adanya ketimpangan yang cukup besar pada LPE antar kabupaten/kota di Jawa Barat.
- 2) Proporsi angka kemiskinan dan pengangguran walaupun ada kecenderungan menurun tetapi pada beberapa tahun kedepan diperkirakan masih relatif besar, sehingga program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja harus masih menjadi prioritas
- 3) Target Indeks daya beli masyarakat Jawa barat tahun 2013 sebesar 64,83 ( Rp 640.550), perlu adanya upaya-upaya yang kongkrit untuk mencapai target tersebut.
- 4) Dengan tantangan perubahan iklim dan out break hama penyakit, dikawatirkan produksi pangan Jawa Barat akan mengalami penurunan pada beberapa tahun

ke depan. Perlu adanya upaya peningkatan produksi pangan melalui perbaikan sistem perbenihan, intensifikasi, proteksi, pengolahan hasil, fasilitasi sarana produksi.

- 5) Kelangkaan energi pada beberapa tahun mendatang diperkirakan akan semakin terasa, sehingga untuk antisipasinya perlu ada upaya peningkatan eksplorasi dan pengembangan sumber energi alternatif.
- 6) Pada tahun 2013 akan dilaksanakan Pemilihan Gubernur. Ada beberapa hal yang perlu dicermati antara lain stabilitas politik dan keamanan, serta adanya Visi baru dari Gubernur terpilih yang akan menentukan kebijakan ekonomi Jawa Barat.
- 7) Terjadi penurunan daya saing beberapa produk andalan Jawa Barat di pasar Global seperti tekstil dan lain-lain, perlu ada upaya-upaya peningkatan daya saing produk Jawa Barat.
- 8) Di bidang teknologi, peran perguruan tinggi dan lembaga litbang dalam memacu inovasi untuk pembangunan masih relatif rendah, sehingga perlu adanya upaya peningkatan peran perguruan tinggi dan lembaga litbang dalam pemacuan inovasi untuk pembangunan Jawa Barat
- 9) Tuntutan upah minimum kerja semakin mencuat di beberapa daerah industri

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, Jawa Barat mempunyai potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang dapat dianggap sebagai prospek dalam menghadapi tantangan tersebut.

**Tabel 3.11. Prospek Perekonomian Jawa Barat**

NO	BIDANG/FENOMENA	URAIAN
INTERNAL		
1	Pertanian/pangan	Jawa Barat memiliki lahan pertanian yang cukup luas, dengan jumlah petani yang cukup bnyak, serta komoditas yang cukup beragam
2	Industri	Jawa Barat memiliki industry yang banyak baik sekala besar, menengah, kecil dan mikro.
3	Energi	Jawa Barat memiliki sumberdaya alam sumber eneregi alternative yang cukup banyak, baik dari bahan tambang maupun komoditas pertanian
4	Teknologi	Jawa Barat memiliki Perguruan tinggi ternama dan lembaga litbang departemen maupun non departemen yang cukup banyak.

NO	BIDANG/FENOMENA	URAIAN
EKSTERNAL		
1	Kelangkaan pangan di tingkat global dan nasional	Merupakan peluang bagi pertanian Jawa Barat dalam pemasaran produk pertanian dan olahannya
2	Pergeseran kekuatan ekonomi ke asia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jawa Barat sebagai kawasan industri terbesar di Indonesia mempunyai peluang dalam peningkatan sector 19industry</li> <li>• Pada tanggal 14 Januari 2010 Atase Perekonomian China (mewakili Pusat Perdagangan Luar Negeri China) melakukan pertemuan bisnis dengan Kamar Dagang dan Industri Jabar. China merencanakan akan membuka pabrik tekstil di Jawa Barat sebagai bentuk investasi China di bidang manufaktur di Indonesia.</li> </ul>
3	Kesiapan Jawa Barat menghadapi <i>Asean Community</i> pada tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jawa Barat memiliki penduduk dan tenaga kerja yang banyak, harus dipersiapkan peningkatan daya saingnya (skill,dll), supaya berkontribusi dominan terhadap lapangan kerja di kancah <i>Asean Community</i>.</li> <li>• Program Jabar mengembara pada tahun 2013 harus mampu mempersiapkan tenaga Jawa Barat dalam kancah <i>Asean Community</i> tahun 2015.</li> <li>• Jika tenaga kerja Jawa Barat berdaya saing tinggi, maka <i>Asean Community</i> merupakan prospek/peluang dalam mengurangi pengangguran, tetapi jika tenaga kerja Jawa Barat berdaya saing rendah, maka lapangan kerja Jawa Barat akan diisi oleh Negara lain sehingga justru menambah jumlah pengangguran.</li> </ul>
4	MP3EI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika MP3EI dapat terealisasi dengan baik, perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan Jawa Barat dalam penciptaan iklim usaha yang lebih baik, diharapkan akan meningkatkan kinerja industri Jawa Barat</li> </ul>

Tahun 2008-2013 merupakan RPJMD tahap ke-2 dengan orientasi Penyiapan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat. Dalam RPJMD tersebut, tahun 2013 merupakan Tahapan Diversifikasi. Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini serta tantangan dan proseek perekonomian Jawa Barat ke depan, maka pada tahun 2013 diperlukan kerangka perekonomian Jawa Barat sebagai berikut.

- 1) Tuntutan upah minimum kerja semakin mencuat di beberapa daerah industri;
- 2) Perlu adanya pemacuan laju pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota yang relative rendah dengan memacu sector unggulan masing-masing kabupaten/kota tersebut;
- 3) Pengendalian jumlah penduduk, penyediaan lapangan kerja serta penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan daya beli masih tetap menjadi prioritas pada pembangunan Jawa Barat tahun 2013;
- 4) Regulasi perizinan yang pro bisnis (perizinan kondusif) dan membenahi permasalahan yang menghambat laju investasi dan daya saing produk;
- 5) Peningkatan penerapan inovasi untuk meningkatkan daya saing daerah dan ekonomi kreatif;

- 6) Peningkatan produksi pangan melalui perbaikan system perbenihan, intensifikasi, proteksi, pengolahan hasil, fasilitasi sarana produksi, perbaikan infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan);
- 7) Peningkatan eksplorasi dan pengembangan sumber energi alternatif;
- 8) Peningkatan peran swasta, yang salah satunya peningkatan peran CSR (peningkatan pendanaan kontribusi dana CSR dan peningkatan sinergitas pembangunan);
- 9) Melalui Program Jabar mengembara, tahun 2013 harus diarahkan kepada peningkatan daya saing tenaga kerja Jawa Barat untuk menyambut diberlakukannya *Asean Community* tahun 2015 (untuk memanfaatkan potensi jumlah tenaga kerja Jawa Barat dan peluang pasar tenaga kerja dan usaha).

#### D. Kabupaten Bogor

Dengan kemajuan yang dicapai pada tahun 2011 dan masalah yang diperkirakan masih dihadapi hingga tahun 2013, maka kebijakan ekonomi makro pada tahun 2013 tetap diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan didasarkan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan hal tersebut, dalam menetapkan rencana target ekonomi makro daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor tetap mengacu pada kerangka ekonomi makro nasional, proyeksi atas kinerja tahun-tahun sebelumnya dan peran APBD dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik, terutama kebutuhan dasar bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, mengacu pada Perda Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Perda Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013, maka kondisi perekonomian Kabupaten Bogor pada tahun 2013 ditargetkan sebagai berikut.

**Tabel 3.12. Target Ekonomi Makro Kabupaten Bogor Tahun 2012 – 2013**

NO	INDIKATOR	2012	2013
1	Nilai PDRB (Rp. Juta)		
	a. Berdasarkan Harga Berlaku	86.606.808	93.575.957
	b. Berdasarkan Harga Konstan	36.601.551	39.185.620
2	Pendapatan per kapita (Rp) (PDRB per kapita)		
	a. Berdasarkan Harga Berlaku	17.223.881	18.118.846
	b. Berdasarkan Harga Konstan	7.279.113	7.587.400
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,41	7,06
4	Penduduk Miskin (%)	7,97	6,97
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	14,50	13,31
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	61,74	62,26

Sumber : RPJMD Kab. Bogor Tahun 2008 - 2013

Dalam rangka pencapaian kondisi ekonomi yang ditargetkan kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Bogor diarahkan pada peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis keunggulan potensi lokal, yang didukung oleh peningkatan ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perbaikan iklim investasi, perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan. Sementara strategi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui kerjasama dengan penyedia tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas tenaga kerja, perluasan lapangan kerja, serta perlindungan ketenagakerjaan.
- 2) Perwujudan sistem ekonomi kerakyatan dengan pengembangan koperasi dan dunia usaha terutama usaha kecil dan menengah, memperluas peluang kerja dan pengembangan kerjasama strategis antar pelaku usaha, serta meningkatkan investasi.
- 3) Penciptaan iklim yang kondusif guna menarik minat investor baik asing maupun domestik
- 4) Pengembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mengembangkan agribisnis dan agroindustri serta mengembangkan sumber daya, sarana dan prasarana pendukung dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
- 5) Pengembangan potensi sumberdaya perdagangan, perlindungan konsumen, peningkatan ekspor, pengembangan regulasi usaha dan peningkatan sarana prasarana perdagangan dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sumberdaya manusia, penguatan permodalan dan peningkatan akses pasar, pemberdayaan UKM serta pengembangan sentra-sentra sesuai dengan potensi unggulan lokal.
- 6) Peningkatan kualitas produksi, penerapan teknologi inovatif tepat guna, dan mengembangkan sentra-sentra produksi untuk memperkuat permodalan dan ketersediaan bahan baku, ketrampilan manajemen usaha dan produksi terutama home industri, menengah dan kecil.

## **3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

### **3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang dituangkan ke dalam tabel 3.13.

Tabel 3.13. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 – 2013

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN (Rp)					
		REALISASI				TARGET	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>						
1.1.	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>316,635,690,464</b>	<b>337,903,884,329</b>	<b>399,262,069,231</b>	<b>696,992,051,376</b>	<b>793,121,132,000</b>	<b>832,777,188,600</b>
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah	159,731,425,185	167,079,071,810	197,020,356,557	456,752,497,703	554,400,892,000	582,120,936,600
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	117,093,957,647	116,502,385,407	119,564,617,840	108,755,927,353	107,892,583,000	113,287,212,150
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13,810,402,411	16,230,267,061	22,914,533,335	23,404,713,901	25,878,083,000	27,171,987,150
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	25,999,905,221	38,092,160,051	59,762,561,499	108,078,912,419	104,949,574,000	110,197,052,700
1.2.	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1,336,366,431,200</b>	<b>1,524,291,997,485</b>	<b>1,611,993,763,844</b>	<b>1,781,177,918,858</b>	<b>1,949,140,058,000</b>	<b>1,791,112,288,000</b>
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	263,487,873,200	350,843,435,485	353,208,822,844	295,335,404,858	118,498,288,000	118,498,288,000
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1,062,589,558,000	1,111,979,562,000	1,115,703,641,000	1,326,116,914,000	1,672,614,000,000	1,672,614,000,000
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	10,289,000,000	61,469,000,000	143,081,300,000	159,725,600,000	158,027,770,000	-
1.3.	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>222,854,290,866</b>	<b>315,941,629,824</b>	<b>500,217,252,056</b>	<b>985,455,796,519</b>	<b>208,718,685,000</b>	<b>208,718,685,000</b>
1.3.1.	Pendapatan Hibah	-	-	2,999,965,000	17,499,965,000	-	-
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	138,520,799,872	165,469,366,353	152,922,830,187	232,333,627,339	208,718,685,000	208,718,685,000
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	7,936,200,000	318,014,644,000	-	-
1.3.5.	Dana Bantuan Penanggulangan Bencana	-	2,009,828,000	-	-	-	-
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	76,127,483,170	117,904,558,432	248,276,185,540	235,986,682,962	-	-
1.3.6.	Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	161,361,091	122,569,440	79,413,653	362,127,035	-	-
1.3.7.	Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau	113,733,480	1,373,482,599	717,766,876	1,204,883,863	-	-
1.3.8.	Dana Perimbangan / Transfer Lainnya	7,930,913,253	-	87,284,890,800	-	-	-
1.3.8.	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah	-	29,061,825,000	-	180,053,866,320	-	-
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1,875,856,412,530</b>	<b>2,178,137,511,638</b>	<b>2,511,473,085,131</b>	<b>3,463,625,766,753</b>	<b>2,950,979,875,000</b>	<b>2,832,608,161,600</b>

### 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

#### 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran;
- 2) Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dengan pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil;
- 3) Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Kebijakan pendapatan daerah disesuaikan dengan kewenangannya, struktur pendapatan daerah dan asal sumber penerimaannya dapat dibagi berdasarkan 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Sedangkan kebijakan pendapatan asli daerah dilakukan dalam berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah meliputi :
  - a. Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan cara membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah serta menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan;
  - b. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, khususnya sektor Perdesaan dan Perkotaan, serta BPHTB dan Pajak Air Tanah yang telah menjadi Pajak Daerah;
  - c. Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pengutannya dan *less distortive* terhadap perekonomian;
  - d. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
  - e. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;

- f. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Provinsi, SKPD Penghasil dan Kecamatan;
  - g. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
  - h. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
  - i. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.
- 2) Dana Perimbangan yaitu merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang bertujuan untuk menutup celah fiskal (*fiscal gap*) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:
- a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN), dan PPh Pasal 21;
  - b. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
  - c. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari pihak ketiga dalam hal ini meliputi bagi hasil yang diperoleh dari pajak pemerintah provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan bagi hasil retribusi dengan pemerintah provinsi serta pendapatan lainnya yang tidak termasuk kelompok PAD dan Dana Perimbangan.

### 3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/ kegiatan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian target IPM, dimana dengan mempertimbangkan pencapaian IPM, diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pencapaian IPM. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM diarahkan untuk

memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan suprastruktur.

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

- 1) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Bogor yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- 2) Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan proper budgeting melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
- 3) Penyusunan belanja kecamatan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bogor;
- 4) Belanja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban daerah untuk meningkatkan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- 5) Penuhuan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari volume anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan penuntasan buta aksara serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;
- 6) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
- 7) Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan, pemberdayaan koperasi dan KUKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan;
- 8) Pengurangan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur hingga dibawah 10 % diantaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja,

peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan;

- 9) Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
- 10) Guna menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Bogor, pemerintah daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung sebesar 45 %, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
- 11) Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
- 12) Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*) dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan;
- 13) Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :
  - a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Mengalokasikan belanja non pegawai seperti belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak, belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, maka proyeksi belanja daerah tahun 2013 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.14. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 – 2011 dan Target/ Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2012 – 2013

NOMOR	U R A I A N	ANGGARAN (Rp)					
		REALISASI				TARGET	PROYEKSI
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II</b>	<b>BELANJA</b>						
<b>2.1.</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1,009,189,458,251</b>	<b>1,168,003,420,872</b>	<b>1,418,667,356,000</b>	<b>1,661,304,776,038</b>	<b>1,614,211,551,000</b>	<b>1,842,733,540,875</b>
2.1.1.	Belanja Pegawai	761,365,834,259	876,132,711,626	1,071,569,901,000	1,243,574,049,174	1,228,175,919,000	1,381,697,908,875
2.1.2.	Belanja Hibah	104,098,534,216	56,961,900,441	66,256,675,000	136,127,342,944	118,341,408,000	208,341,408,000
2.1.3.	Belanja Bantuan Sosial	49,224,322,300	114,535,918,971	142,970,051,000	108,144,255,026	21,996,872,000	21,996,872,000
2.1.4.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	33,891,162,961	25,464,051,072	25,416,613,000	27,976,082,854	51,703,158,000	51,703,158,000
2.1.5.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Lainnya	54,413,974,495	94,233,838,762	109,954,116,000	144,431,525,718	173,994,194,000	173,994,194,000
2.1.6.	Belanja Tidak Terduga	6,195,630,020	675,000,000	2,500,000,000	1,051,520,322	20,000,000,000	5,000,000,000
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>749,605,264,465</b>	<b>1,011,660,481,183</b>	<b>1,367,277,054,000</b>	<b>1,577,405,527,831</b>	<b>1,749,202,209,000</b>	<b>1,792,799,838,363</b>
2.2.1.	Belanja Pegawai	127,853,258,853	141,469,664,634	146,843,580,000	187,984,398,481	194,823,157,000	
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	255,690,472,546	359,865,841,880	525,302,226,000	685,185,695,599	640,515,379,000	
2.2.3.	Belanja Modal	366,061,533,066	510,324,974,669	695,131,248,000	704,235,433,751	913,863,673,000	
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1,758,794,722,716</b>	<b>2,179,663,902,055</b>	<b>2,785,944,410,000</b>	<b>3,238,710,303,869</b>	<b>3,363,413,760,000</b>	<b>3,635,533,379,238</b>

Tabel 3.15. Rekapitulasi Proyeksi Belanja Langsung SKPD Kabupaten Bogor Tahun 2013

KODE REKENING	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)			
		APBD II	APBD I	APBN	TOTAL
1	2	3	4	5	6
1	<b>URUSAN WAJIB</b>	<b>1,503,332,411,312</b>	<b>38,300,000,000</b>	<b>46,077,267,000</b>	<b>1,587,709,678,312</b>
1 01	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>220,745,051,860</b>	-	-	<b>220,745,051,860</b>
1 01 01	Dinas Pendidikan	220,745,051,860	-	-	220,745,051,860
1 02	<b>KESEHATAN</b>	<b>330,057,888,700</b>	<b>13,300,000,000</b>	<b>6,077,267,000</b>	<b>349,435,155,700</b>
1 02 01	Dinas Kesehatan	169,934,705,000	13,300,000,000	6,077,267,000	189,311,972,000
1 02 02	Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong	69,849,423,000	-	-	69,849,423,000
1 02 03	Rumah Sakit Umum Daerah Cawi	61,724,612,000	-	-	61,724,612,000
1 02 04	Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang	28,549,148,700	-	-	28,549,148,700
1 03	<b>PEKERJAAN UMUM</b>	-	-	-	-
1 03 02	Dinas Bina Marga dan Pengairan	-	-	-	-
1 03 03	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	-	-	-	-
1 04	<b>PERUMAHAN</b>	<b>19,527,212,000</b>	-	-	<b>19,527,212,000</b>
1 04 01	Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman	19,527,212,000	-	-	19,527,212,000
1 05	<b>PENATAAN RUANG</b>	<b>10,808,385,000</b>	-	-	<b>10,808,385,000</b>
1 05 01	Dinas Tata Ruang dan Pertanahan	10,808,385,000	-	-	10,808,385,000
1 06	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>12,671,340,000</b>	-	-	<b>12,671,340,000</b>
1 06 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12,671,340,000	-	-	12,671,340,000
1 07	<b>PERHUBUNGAN</b>	<b>62,594,775,000</b>	<b>19,000,000,000</b>	-	<b>81,594,775,000</b>
1 07 01	Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	62,594,775,000	19,000,000,000	-	81,594,775,000
1 08	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>6,761,755,275</b>	-	-	<b>6,761,755,275</b>
1 08 01	Badan Lingkungan Hidup	6,761,755,275	-	-	6,761,755,275
1 10	<b>KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>	<b>14,723,559,300</b>	-	-	<b>14,723,559,300</b>
1 10 01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14,723,559,300	-	-	14,723,559,300
1 11	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>15,082,398,000</b>	-	-	<b>15,082,398,000</b>
1 11 01	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	15,082,398,000	-	-	15,082,398,000
1 14	<b>KETENAGAKERJAAN</b>	<b>22,117,918,000</b>	-	-	<b>22,117,918,000</b>
1 14 01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	22,117,918,000	-	-	22,117,918,000
1 15	<b>KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>	<b>26,753,518,000</b>	<b>6,000,000,000</b>	<b>40,000,000,000</b>	<b>72,753,518,000</b>
1 15 01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian & Perdagangan	26,753,518,000	6,000,000,000	40,000,000,000	72,753,518,000
1 18	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>415,898,384,000</b>	-	-	<b>415,898,384,000</b>
1 18 01	Dinas Pemuda dan Olahraga	415,898,384,000	-	-	415,898,384,000
1 19	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>	<b>29,979,317,690</b>	-	-	<b>29,979,317,690</b>
1 19 02	Satuan Polisi Pamong Praja	23,892,739,750	-	-	23,892,739,750
1 19 03	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	6,086,577,940	-	-	6,086,577,940
1 20	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN</b>	<b>263,275,049,420</b>	-	-	<b>263,275,049,420</b>
1 20 03	Sekretariat Daerah	60,870,851,000	-	-	60,870,851,000
1 20 04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	35,057,604,000	-	-	35,057,604,000
1 20 05	Inspektorat Kabupaten	9,372,766,420	-	-	9,372,766,420
1 20 07	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	25,937,039,000	-	-	25,937,039,000
1 20 08	Kecamatan Cibinong	1,520,550,000	-	-	1,520,550,000
1 20 09	Kecamatan Babakanmadang	542,075,000	-	-	542,075,000
1 20 10	Kecamatan Gunungputri	555,100,000	-	-	555,100,000
1 20 11	Kecamatan Sukaraja	572,800,000	-	-	572,800,000
1 20 12	Kecamatan Citeureup	782,650,000	-	-	782,650,000
1 20 13	Kecamatan Cileungsi	699,900,000	-	-	699,900,000
1 20 14	Kecamatan Jonggol	555,650,000	-	-	555,650,000
1 20 15	Kecamatan Cariu	537,400,000	-	-	537,400,000
1 20 16	Kecamatan Sukamakmur	511,000,000	-	-	511,000,000
1 20 17	Kecamatan Kelapanunggal	546,550,000	-	-	546,550,000
1 20 18	Kecamatan Ciomas	646,825,000	-	-	646,825,000
1 20 19	Kecamatan Dramaga	584,275,000	-	-	584,275,000
1 20 20	Kecamatan Ciampel	553,650,000	-	-	553,650,000
1 20 21	Kecamatan Pamijahan	547,275,000	-	-	547,275,000
1 20 22	Kecamatan Cibungbulang	576,150,000	-	-	576,150,000
1 20 23	Kecamatan Rumpin	541,000,000	-	-	541,000,000
1 20 24	Kecamatan Leuwiliang	667,950,000	-	-	667,950,000
1 20 25	Kecamatan Cigugug	545,000,000	-	-	545,000,000
1 20 26	Kecamatan Parungpanjang	537,000,000	-	-	537,000,000

KODE REKENING		URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)				
			APBD II	APBD I	APBN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6		
1	20	27	Kecamatan Terjo	521,650,000	-	-	521,650,000
1	20	28	Kecamatan Jasinga	558,350,000	-	-	558,350,000
1	20	29	Kecamatan Sukajaya	522,550,000	-	-	522,550,000
1	20	30	Kecamatan Nanggung	533,625,000	-	-	533,625,000
1	20	31	Kecamatan Kemang	750,275,000	-	-	750,275,000
1	20	32	Kecamatan Bojongsgede	559,200,000	-	-	559,200,000
1	20	33	Kecamatan Parung	679,250,000	-	-	679,250,000
1	20	34	Kecamatan Rancabungur	505,000,000	-	-	505,000,000
1	20	35	Kecamatan Gunungsindur	546,350,000	-	-	546,350,000
1	20	36	Kecamatan Ciseeng	530,050,000	-	-	530,050,000
1	20	37	Kecamatan Clawi	706,700,000	-	-	706,700,000
1	20	38	Kecamatan Cijeruk	535,200,000	-	-	535,200,000
1	20	39	Kecamatan Megamendung	660,600,000	-	-	660,600,000
1	20	40	Kecamatan Cisarua	721,700,000	-	-	721,700,000
1	20	41	Kecamatan Caringin	543,500,000	-	-	543,500,000
1	20	42	Kecamatan Taman Sari	622,800,000	-	-	622,800,000
1	20	43	Kecamatan Cigombong	586,800,000	-	-	586,800,000
1	20	44	Kecamatan Tenjolaya	516,650,000	-	-	516,650,000
1	20	45	Kecamatan Tajurhalang	505,000,000	-	-	505,000,000
1	20	46	Kecamatan Tanjungsari	530,050,000	-	-	530,050,000
1	20	47	Kecamatan Leuwisadeng	507,900,000	-	-	507,900,000
1	20	48	Badan Perijinan Terpadu	13,641,500,000	-	-	13,641,500,000
1	20	49	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	1,695,668,000	-	-	1,695,668,000
1	20	50	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25,843,950,000	-	-	25,843,950,000
1	20	51	Dinas Pengelolaan Keuangan dan barang Daerah	24,650,074,000	-	-	24,650,074,000
1	20	52	Dinas Pendapatan Daerah	42,039,597,000	-	-	42,039,597,000
1	22		<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>14,656,273,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14,656,273,000</b>
1	22	01	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	14,656,273,000	-	-	14,656,273,000
1	24		<b>KEARSIPAN</b>	<b>6,798,034,067</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,798,034,067</b>
1	24	01	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah	6,798,034,067	-	-	6,798,034,067
1	25		<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>30,881,552,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30,881,552,000</b>
1	25	01	Dinas Komunikasi dan Informasi	30,881,552,000	-	-	30,881,552,000
2			<b>URUSAN PILIHAN</b>	<b>150,860,521,500</b>	<b>24,583,417,541</b>	<b>29,646,221,010</b>	<b>205,090,160,051</b>
2	01		<b>PERTANIAN</b>	<b>56,967,332,500</b>	<b>3,683,417,541</b>	<b>29,646,221,010</b>	<b>90,296,971,051</b>
2	01	01	Dinas Pertanian dan Kehutanan	25,114,867,600	1,500,000,000	13,084,793,100	39,699,660,700
2	01	02	Dinas Peternakan dan Perikanan	20,820,515,900	1,508,417,541	15,561,427,910	37,890,361,351
2	01	03	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	11,031,949,000	675,000,000	1,000,000,000	12,706,949,000
2	03		<b>ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL</b>	<b>65,515,871,000</b>	<b>7,000,000,000</b>	<b>-</b>	<b>72,515,871,000</b>
2	03	01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	65,515,871,000	7,000,000,000	-	72,515,871,000
2	04		<b>PARIWISATA</b>	<b>28,377,318,000</b>	<b>13,900,000,000</b>	<b>-</b>	<b>42,277,318,000</b>
2	04	01	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	28,377,318,000	13,900,000,000	-	42,277,318,000
			<b>TOTAL</b>	<b>1,654,192,932,812</b>	<b>62,883,417,541</b>	<b>75,723,488,010</b>	<b>1,792,799,838,363</b>

### 3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2013 adalah :

1. Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.
2. Pencairan dana cadangan akan dipergunakan untuk pembiayaan Pemilu Kepala Daerah pada tahun 2013, sesuai dengan mekanisme pendanaan yang telah diatur dalam peraturan daerah yang telah ditetapkan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian bantuan kepada pemerintah kecamatan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2013 direncanakan untuk penyertaan modal BUMD sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Kebijakan untuk dana masyarakat dan mitra yang merupakan potensi daerah perlu terus dikembangkan dan didorong untuk mendukung proses pembangunan Kabupaten Bogor. Pengembangan tersebut diarahkan melalui upaya menjalin kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta/masyarakat untuk menarik investasi yang lebih besar di Kabupaten Bogor. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah :

1. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Kabupaten Bogor;

2. Kerjasama investasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan pihak swasta atau dengan pemerintah daerah lain dengan perjanjian yang disepakati;
3. Mendorong peningkatan investasi langsung oleh masyarakat lokal;
4. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang merupakan wujud pelayanan publik dalam tata pemerintahan;
5. Meningkatkan koordinasi program melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
6. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana investasi ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian, industri pengolahan dan industri manufaktur.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, proyeksi/target tahun 2012-2013 dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.16. Realisasi / Target / Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 – 2013

NOMOR	U R A I A N	ANGGARAN (Rp)					
		REALISASI				TARGET	PROYEKSI
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8
III	<b>PEMBIAYAAN</b>						
3.1.	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>						
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	320,221,431,395	432,323,989,949	402,208,954,000	261,335,954,857	467,933,885,000	-
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	15,000,000,000	-	-	-	-	30,000,000,000
3.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	5,530,789,567	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>340,752,220,962</b>	<b>432,323,989,949</b>	<b>402,208,954,000</b>	<b>261,335,954,857</b>	<b>467,933,885,000</b>	<b>30,000,000,000</b>
3.2.	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>						
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	30,000,000,000	-
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	17,250,000,000	26,269,768,000	23,407,750,000	8,494,000,000	25,500,000,000	30,400,000,000
3.2.3.	Pembayaran Utang	2,816,524,323	2,318,876,867	-	-	-	-
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>20,066,524,323</b>	<b>28,588,644,867</b>	<b>23,407,750,000</b>	<b>8,494,000,000</b>	<b>55,500,000,000</b>	<b>30,400,000,000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>320,685,696,639</b>	<b>403,735,345,082</b>	<b>378,801,204,000</b>	<b>252,841,954,857</b>	<b>412,433,885,000</b>	<b>(400,000,000)</b>

**Tabel 3.17. Rekapitulasi Proyeksi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013**

NOMOR	U R A I A N	ANGGARAN	PROYEKSI
		2012	2013
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	793,121,132,000	832,777,188,600
1.2.	Dana Perimbangan	1,949,140,058,000	1,791,112,288,000
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	208,718,685,000	208,718,685,000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2,950,979,875,000</b>	<b>2,832,608,161,600</b>
<b>II</b>	<b>BELANJA</b>		
2.1.	Belanja Tidak Langsung	1,614,211,551,000	1,842,733,540,875
2.2.	Belanja Langsung	1,749,202,209,000	1,792,799,838,363
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3,363,413,760,000</b>	<b>3,635,533,379,238</b>
	<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(412,433,885,000)</b>	<b>(802,925,217,638)</b>
<b>III</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	467,933,885,000	30,000,000,000
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	55,500,000,000	30,400,000,000
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>412,433,885,000</b>	<b>(400,000,000)</b>
3.3.	<b>Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	-	<b>(803,325,217,638)</b>